

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan suatu proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti laporan keuangan yang valid dan relevan. Pada dasarnya tujuan audit yaitu untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014:19) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa *auditing* adalah

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditentukan.”

Menurut Sukrisno Agoes (2015:4) pengertian auditing adalah :

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:9) pengertian audit adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan

kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Definisi Audit menurut Miller dan Bailley dalam Abdul Halim (2015:3)

adalah sebagai berikut :

“Audit adalah tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item, termasuk verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh auditor atau ditetapkan oleh praktik umum, tujuannya untuk menyatakan pendapat atau mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa *auditing* adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan ekonomi dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut.

2.1.1.2 Jenis-jenis Auditing

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014:12-15) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa tiga jenis utama audit yaitu :

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit oprasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasinal, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Karena banyaknya bidang yang efektivitas operasionalnya dapat dievaluasi, tidak tidak mungkin menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit operasional yang tipikal. Dalam organisasi yang satu, auditor mungkin mengevaluasi relevansi dan kecukupan informasi yang digunakan manajemen dalam membuat keputusan untuk memperoleh asset tetap baru.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu. Bila organisasi seperti IRS ingin menentukan apakah individu atau organisasi telah menaati persyaratannya, auditor dipekerjakan oleh organisasi yang mengeluarkan persyaratan tersebut.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S atau internasional, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diinterpretasikan bahwa jenis-jenis audit dibagi menjadi 3 yaitu Audit Oprasional, Audit Ketaatan, dan Audit Laporan Keuangan. Ketiga jenis audit ini memiliki kriteria yang berbeda-beda. Audit laporan keuangan memiliki kriteria yaitu standar akuntansi A.S atau internasional yang biasa dikenal dengan sebutan AICPA atau *American Institute of Certified Public Accountant* dimana seorang auditor mungkin saja menggunakan akuntansi dasar untuk menyusun laporan keuangan.

2.1.1.3 Tujuan Auditing

Tujuan audit pada umumnya yaitu menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini maka auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit yang spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan demikian tujuan audit menghendaki

akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan sesuai standar *auditing*.

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah :

“Mengangkat tingkat kepercayaan diri pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014:19) yang

diterjemahkan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa tujuan *auditing* adalah :

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja kauntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

2.1.1.4 Standar Auditing

Standar auditing atau dikenal dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya (IAI,2001). Standar Auditing berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu pelaksanaan audit serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar ini meliputi pertimbangan kualitas professional auditor, seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan (IAI, 2001).

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit penusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerja Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip tersebut dalam periode sebelumnya.
 - b. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - c. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuai asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan keuangan harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.1.5 Proses Auditing

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:226-228) ada 4 tahapan dalam proses audit yaitu :

1. Merencanakan dan mendesai pendekatan audit

Ada 2 pertimbangan utama yang mempengaruhi jenis pendekatan yang akan digunakan oleh auditor, yaitu : harus terkumpul bukti audit yang cukup kompeten agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor dan biaya pengumpulan bukti audit ini haruslah seminimal mungkin. Pertimbangan atas pengumpulan bukti yang cukup kompeten serta kewajiban untuk mengendalikan biaya audit membuat diperlukannya suatu perencanaan audit. rencana audit ini harus menghasilkan suatu pendekatan

audit yang efektif pada suatu tingkat biaya audit yang wajar. Perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Dari 2 bagian-bagian perencanaan tersebut terdiri dari :

- Memperoleh pemahaman akan strategi bisnis klien dan memposes serta menilai resiko
 - Memahami pengendalian intern dan menilai resiko pengendalian
2. Melaksanakan uji pengendalian dan uji substantive atas transaksi
Ketika auditor telah mengurangi taksiran resiko pengendalian dengan mendasarkan diri pada pengidentifikasian pengendalisan, ia selanjutnya dapat mengurangi lingkup audit pada sejumlah tempat dimana akurasi informasi dalam laporan keuangan yang terkait langsung dari berbagai pengendalian tersebut didukung oleh pengumpulan berbagai bukti audit. Untuk menyesuaikan semula, maka auditor harus melakukan uji atas efektivitas dari pengendalian tersebut. Prosedur-prosedur yang terkait dengan jenis uji semacam ini umumnya disebut sebagai uji pengendalian (*test of control*). Auditor juga harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi itu. Verifikasi ini dikenal sebagai uji substansif atas transaksi.
 3. Melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo
Prosedur analitis menggunakan perbandingan-perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun-akun atau tampilan data—data lainnya tampak wajar. Sedangkan uji rincian saldo merupakan berbagai prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada akun-akun dalam laporan keuangan.
 4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit

2.1.1.6 Jenis-jenis Auditing

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014:19) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa ada beberapa jenis auditor yang dewasa ini berpraktik. Jenis yang paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintahan, agen-agen penerimaan negara (*internal revenue*), dan auditor internal. Penjelasan mengenai jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik
Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan hisiros yang dipublikasikan oleh semuaperusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi

nonkomersial yang lebih kecil. Karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian A.S serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan public dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan public mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan public. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah

Auditor badan akuntabilitas pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office (GAO) A.S sebuah badan nonpartisipan dalam cabang legislative pemerintah federal. Dengan diketuai oleh Comptroller General, GAO hanya melapor dan bertanggung jawab kepada kongres. Tanggung jawab utama GAO adalah melaksanakan fungsi audit sebagai kongres, dan badan ini memiliki banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah KAP. GAO mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang disiapkan oleh berbagai badan pemerintah federal sebelum diserahkan kepada kongres. Karena kewenangan untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan pada badan-badan pemerintah ditetapkan oleh hukum, dalam audit ini penekanan cukup besar diberikan pada kepatuhan atau ketaatan

3. Agen Penerimaan Negara

IRS, di bawah arahan Commissioner of Internal Revenue, bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak federal sebagaimana yang didefinisikan oleh kongres dan diinterpretasikan oleh pengadilan. Salah satu tanggung jawab utama IRS adalah mengaudit SPT pajak wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melaksanakan pemeriksaan ini disebut *internal revenue agent* (agen penerimaan negara).

4. Auditor Internal

Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti GAO mengaudit untuk kongres. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung ada si pemberi kerja. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab yang berlainan, termasuk di banyak bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:54) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 7 macam yaitu :

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)

Akuntan public adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan public

2. Auditor Intern (*Internal Auditor*)
Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai organisasi.
3. Manajemen Auditor (*Operational Audit*)
Manajemen audit disebut juga operational audit, functional audit, system audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi atau perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Manajemen audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan pemeriksa keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh presiden. Nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut :
 - a. Independensi
 - b. Integritas
 - c. Profesionalisme
5. Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
6. Inspektorat Jendral (Itjen) di Departemen
Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jendral (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen/kemertrian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.
7. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)
Badan pengawas daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesi baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan pengawas daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2015:146) kompetensi adalah :

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang berkompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas menjalankan kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (Knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Fitrawansyah (2014:46) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

“Kompetensi artinya auditor harus memiliki keahlian dibidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya.”

Kurnia dan Elly (2013:2) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang diambilnya.”

Menuet Efendy (2010:21) mengatakan bahwa :

“Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif.”

2.1.2.2 Karakteristik Kompetensi Auditor

Adapun beberapa karakteristik kompetensi menurut Lyle Spencer & Signe Spencer dalam Moeheriono (2014:53) terdapat 5 karakteristik kompetensi, adalah sebagai berikut :

1. “Motif (*Motive*) adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif mampu menggerakkan, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju kepada tindakan tertentu atau kepada tujuan. Orang-orang yang termotivasi untuk mencapai sesuatu secara konsisten membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, dan menggunakan umpan balik untuk melakukan lebih baik ke depannya. Motif atau (*motives*) yang harus dimiliki oleh auditor internal meliputi (1) Orientasi pada pencapaian (*achievements orientation*), (2) Dampak dan pengaruh (*impact and influence*). *impact and influence* mencerminkan niat untuk mendekati, meyakinkan, mempengaruhi atau membuat orang lain terkesan, agar mereka mendukung agenda tertentu atau mereka menjadi terpengaruh.
2. Sifat (*Traits*) adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi. Merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Begitu pula dengan kompleksnya mengontrol emosi sendiri dan berinisiatif sebagai bentuk respon-respon yang harus konsisten pada setiap situasi. Sifat atau traits yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal meliputi (1) Inisiatif (*Inisiatives*), (2) Bekerjasama sama dengan tim (*Teamwork and cooperation*). Esensi dari inisiatif ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan orang lain dan dampaknya ketimbang sebuah peran formal. Bisa dengan mengirim orang ke program pelatihan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan perusahaan. Cara lain adalah dengan mengembangkan kolega, klien, bahkan atasan. Bekerjasama dengan tim berarti kemauan sungguh-sungguh untuk bekerja secara kooperatif dengan pihak lain yang merupakan bagian dari sebuah tim, bekerja bersama sehingga lebih kompetitif.
3. Konsep diri (*self-concept*) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan membuat orang tersebut efektif di hampir situasi apapun. Konsep diri atau *self-concept* yang harus dimiliki oleh auditor internal meliputi (1) Percaya diri (*self confidence*), (2) Kontrol diri (*self control*). Percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan serta memiliki konsep berfikir yang luas. Kontrol diri merupakan cara seseorang untuk mengendalikan diri mereka sendiri, seperti mampu menangani adanya ketidakpastian dan menyadari bahwa beberapa temuan bersifat subjektif.
4. Pengetahuan (*knowledge*). Karakteristik ini merupakan kompetensi yang kompleks. *Knowledge* menginformasikan bahwa seseorang memiliki kadar pada bidang-bidang khusus. Pengetahuan atau *knowledge* meliputi : (1) senantiasa mencari informasi (*information seeking*), (2) memahami ilmu akuntansi dan standar *auditing*, (3) Memiliki pengetahuan review analisis.
5. Keterampilan (*skill*) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi

keterampilan mental atau kognitif meliputi : (1) Pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, mempresentasikan laporan dengan baik) dan (2) Memiliki keahlian teknis (melakukan wawancara dan menggunakan komputer)/ berdasarkan karakteristik kompetensi diatas dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan pengalaman serta factor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.

2.1.2.3 Komponen Kompetensi Auditor

Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil, Kurnia dan Ely (2013:25) :

1. Kompetensi Pendidikan
Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan berkelanjutan.
2. Komponen Pengetahuan
Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam.
3. Komponen Pelatihan
Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi. Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptis dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut.

2.1.3 Due Professional Care Auditor

2.1.3.1 Pengertian *Due Professional Care Auditor*

Menurut Sukrisno Agoes (2012:36) pengertian *Due Professional Care* adalah sebagai berikut:

“*Due Professional Care* adalah sikap cermat dan seksama dengan berfikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.”

Menurut (Rani Febrianti, 2015) pengertian *Due Professional Care* adalah sebagai berikut:

“*Due Professional Care* merupakan kecermatan dan seksama, dimana kecermatan dan keseksamaan akan menuntun auditor pada sikap skeptisme profesional, dimana auditor harus bersikap kritis, menanyakan apa yang menurut auditor tersebut mencurigakan dan juga mengevaluasi setiap bukti yang telah didapatkan oleh auditor.”

Sedangkan PSA No 4 SPAP (2011), menyatakan standar umum yaitu :

“Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.”

Dari ketiga pengertian diatas mengenai *Due Professional Care* dapat diinterpretasikan bahwa *due professional care* adalah suatu sikap kecermatan dan keseksamaan dengan berfikir kritis yang selalu mempertanyakan evaluasi terhadap bukti audit yang harus dimiliki auditor.

2.1.3.2 Tujuan *Due Professional Care Auditor*

Menurut Pancawati dan Rachmawati (2012) tujuan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama yaitu :

“Memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Hoesada (2012:22) tujuan auditor melaksanakan tugasnya secara cermat dan seksama adalah :

“Agar aktifitas dan perilaku professional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kekurangcermatan audit yang diseimbangkan dengan keperluan menghindari risiko audit sendiri.”

Dari kedua pengertian mengenai tujuan *due professional care* diatas dapat diinterpretasikan bahwa tujuan *due professional care* yaitu untuk memungkinkan auditor memperoleh keyakinan yang memadai dan laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

2.1.3.3 Karakteristik *Due Professional Care* Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2012:22) terdapat dua karakteristik dalam *due professional care* yang harus diperhatikan oleh setiap auditor, diantaranya :

1. Skeptisme Profesional
Didalam (SPAP, 2011:230:2), pengawasan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme professional, skeptisme professional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit dan auditor menggunakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi auditor untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif
2. Keyakinan yang memadai
Dan didalam (SPAP, 2011:230.2), penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan dan

keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut dan karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasar standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.

Menurut (Annisa & Wirakusuma, 2016) ada dua karakteristik didalam *due professional care* yaitu:

“*Due professional care* memiliki dua karakteristik yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai, *Due professional care* ialah suatu hal penting yang wajib diterapkan kepada auditor sehingga akan tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya”.

Dari kedua karakteristik *due professional care* yang telah di uraikan diatas dapat diinterpretasikan bahwa karakteristik *due professional care* yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai.

2.1.4 Persuasivitas Bukti Audit

2.1.4.1 Pengertian Bukti Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014:206) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa bukti audit adalah :

“Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar.”

Menurut Mulyadi (2014:74) mendefinisikan bukti audit sebagai berikut :

“Segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat (*corroborating information*) yang tersedia bagi auditor.”

Dari pengertian bukti audit diatas dapat di interpretasikan bahwa bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor untuk dijadikan dasar penilaian dengan cara membandingkan kesesuaian informasi yang disajikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.4.2 Jenis-jenis Bukti Audit

Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari delapan kategori bukti yang luas, yang disebut sebagai jenis-jenis bukti. Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis-jenis bukti. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:212-218) jenis-jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik (*Physical examination*)
Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau asset berwujud. Jenis bukti ini paling sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan asset tetap berwujud. Pemeriksaan fisik adalah cara langsung untuk memverifikasi apakah suatu asset benar-benar ada (tujuan eksistensi), dan pada tingkat tertentu apakah asset yang ada itu dicatat (tujuan kelengkapan). Pemeriksaan fisik dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling dapat diandalkan dan berguna. Pada umumnya, pemeriksaan fisik adalah cara yang objektif untuk mengetahui kuantitas maupun deskripsi asset tersebut.
2. Konfirmasi (*Confirmation*)
Konfirmasi menggambarkan penerimaan respons tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diterima oleh auditor. Respons nya dalam bentuk kertas atau elektronik atau media lainnya, seperti akses langsung auditor ke informasi yang dimiliki pihak ketiga. permintaan ini ditujukan kepada klien, dan klien meminta pihak ketiga untuk meresponsnya secara langsung kepada auditor. Karena konfirmasi berasal dari sumber pihak ketiga alih-alih klien, jenis bukti audit ini sangat dipercaya dan merupakan jenis bukti yang sering digunakan.
3. Inspeksi (*Inspection*)
Inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji, dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan

yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisasi, yang bisa juga dalam bentuk kertas, bentuk elektronik atau media lain. Karena setiap transaksi dalam organisasi klien biasanya didukung paling tidak oleh selebar dokumen, jenis bukti audit ini tersedia dalam jumlah besar.

4. *Prosedur Analitis (Analytical procedures)*
 Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analitis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan nonkeuangan. Prosedur analitis telah digunakan secara luas dalam praktik, dan dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit. Tujuan prosedur analitis adalah : (1) Memahami industri dan bisnis klien, (2) Menilai kemampuan entitas untuk terus goin concern, (3) Menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, (4) Mengurangi pengujian audit yang terinci.
5. *Wawancara dengan klien (Inquiries of the client)*
 Tanya jawab atau wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respons atas pertanyaan yang diajukan auditor. Walaupun banyak bukti yang dapat diperoleh dari klien melalui tanya jawab ini, bukti itu biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen dan mungkin mendukung pihak klien. Karena itu, apabila auditor memperoleh bukti melalui tanya jawab, biasanya auditor juga perlu memperoleh bukti pendukung melalui prosedur lainnya. (bukti pendukung adalah bukti tambahan untuk mendukung bukti awal atau asli).
6. *Rekalkulasi (Recalculation)*
 Rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan beban kalkulasi penyusutan dan beban dibayar dimuka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak audit dengan bantuan computer.
7. *Pelaksanaan Ulang (Reperformance)*
 Pelaksanaan ulang adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien, yang semula dilakukan sebagai bagian dari system akuntansi dan pengendalian internal klien. Jika rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas suatu perhitungan, pelaksanaan ulang melibatkan pengecekan atas prosedur lain.
8. *Observasi (Observation)*
 Observasi terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien, atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang disertai tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Observasi memberikan bukti tentang pelaksanaan proses atau prosedur tetapi terbatas pada poin-poin ketika observasi dilakukan.

Observasi dapat diandalkan karena risiko personil klien akan mengubah perilakunya akibat kehadiran auditor.

2.1.4.3 Pengerian dan Unsur-unsur Persuasivitas Bukti Audit

2.1.4.3.1 Pengertian Persuasivitas Bukti Audit

Standar pekerja lapangan ketiga mewajibkan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi untuk mendukung pendapat yang akan diterbitkan. Karena sifat bukti audit serta pertimbangan biaya dalam melaksanakan audit, tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh keyakinan 100% bahawa pendapatnya benar. Namun auditor harus yakin bahwa pendapatnya benar dengan tingkan assurance yang tinggi. Dengan menghubungkan semua bukti yang diperoleh dari suatu audit, auditor akan mampu memutuskan kapan ia merasa yakin untuk menerbitkan suatu laporan audit. (Arens *et al.* 2014:208)

2.1.4.3.2 Ketepatan Bukti Audit

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:209) yang dimaksud dengan ketepatan bukti yaitu :

“Ketepatan bukti (*appropriateness of evidence*) adalah ukuran mutu bukti, yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Jika suatu bukti dianggap sangat tepat, maka akan membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar.”

Menurut Arens dkk (2014) ketepatan memiliki dua faktor diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Relevansi Bukti

Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Relevansi hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit khusus, karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya

2. Reliabilitas Bukti

Reliabilitas bukti mengacu pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Seperti relevansi, jika bukti dianggap dapat diandalkan, bukti tersebut sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

Reliabilitas, dan dengan demikian ketepatan, tergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan berikut :

a. Independensi Penyedia Bukti

Bukti yang diperoleh dari sumber luar entitas lebih dapat diandalkan ketimbang yang diperoleh dari dalam entitas. Komunikasi dari bank, pengacara, atau pelanggan umumnya dianggap lebih dapat diandalkan ketimbang jawaban yang diperoleh dari wawancara dengan klien

b. Efektifitas Pengendalian Internal

Jika pengendalian internal klien efektif, bukti audit yang diperoleh lebih dapat diandalkan ketimbang jika pengendalian internalnya lemah.

c. Pengetahuan Langsung Auditor

Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui audit fisik, observasi, perhitungan ulang dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung

d. Kualifikasi Individu Yang Menyediakan Informasi

Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak akan dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu, karena itu, komunikasi dengan pengacara dan konfirmasi bank umumnya lebih bernilai ketimbang konfirmasi piutang usaha dari orang-orang yang kurang memahami dunia bisnis. Selain itu, bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor juga tidak dapat diandalkan jika auditor tidak memenuhi kualifikasi untuk mengevaluasi bukti itu.

e. Tingkat Objektivitas

Bukti yang diperoleh dapat diandalkan ketimbang bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut benar.

f. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu bukti audit dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan maupun pada periode yang tercakup oleh audit itu. Bukti ini biasanya lebih dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca.

2.1.4.3.3 Kecukupan Bukti

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014:210-211) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo, kecukupan bukti audit adalah :

“Kecukupan bukti audit diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 umumnya lebih mencukupi ketimbang dari sampel sebanyak 50.”

Beberapa factor akan menentukan ketepatan ukuran sampel dalam audit. dua factor yang paling penting adalah ekspektasi auditor atas salah saji dan keefektifan pengendalian internal klien. (Arens et al., 2014:211)

2.1.4.3.4 Dampak Gabungan Ketepatan dan Kecukupan Bukti

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:211) yang dampak gabungan ketepatan dan kecukupan bukti adalah sebagai berikut :

“Persuasivitas bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan, termasuk pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan kecukupan tersebut. Sejumlah besar sampel bukti audit yang disediakan oleh pihak independen tidak bersifat persuasif kecuali bukti tersebut relevan dengan tujuan audit yang sedang diuji. Sejumlah besar sampel bukti yang relevan tetapi tidak objektif juga tidak persuasif. Demikian pula, sampel yang sedikit hanya terdiri dari satu atau dua bukti yang sangat tepat biasanya juga kurang memiliki persuasivitas. Ketika menentukan persuasivitas bukti, auditor harus mengevaluasi apakah tingkat ketepatan dan kecukupan termasuk semua faktor yang mempengaruhi kedua hal itu telah dipenuhi.”

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Persuasivitas Bukti Audit

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2014:3) mengemukakan :

“Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen. Hal ini berarti bahwa seorang auditor harus mempunyai kompetensi untuk mengumpulkan bahan bukti audit yang diperlukan untuk memberikan penilaian audit.”

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Heru Prastomo pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kompetensi Auditor dan Risiko Audit Terhadap Persuasivitas Bukti Audit.”

Kompetensi audit mencakup seluruh pengetahuan auditor akan dunia audit itu sendiri, tolak ukurnya adalah tingkat sertifikasi pendidikan dan jenjang pendidikan sarjana formal (Gusti dan Ali, 2008). Auditor yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan berperilaku pantas sesuai dengan persepsi serta ekspektasi orang lain dan lingkungan tempat auditor bekerja.

Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau symposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar/symposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya (Ida Suraida, 2005)

Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kompetensi memiliki pengaruh terhadap bukti audit, yang artinya semakin

kompeten seseorang maka semakin banyak bukti audit yang akan diperolehnya sehingga dapat mencukupi kebutuhan laporan audit yang diinginkan.

2.2.2 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Persuasivitas Bukti Audit

Due professional care dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. (Wiratama & Budiarta, 2015).

Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Arens (2017:36) dalam Rika Rahmawita (2021) yaitu :

“Auditor memiliki keharusan secara professional dalam melaksanakan kewajibannya dengan cermat serta mencegah dari adanya potensi kelalaian dan sikap mudah percaya. Auditor tetap harus awas terhadap keadaan yang memungkinkan terjadinya salah saji akibat adanya manipulasi serta bersikap cermat terhadap bukti audit yang diperoleh.”

Akuntan publik memerlukan kecermatan yang memadai dalam pekerjaannya untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dan menghindarkan dari terjadinya salah saji material dalam laporannya. Seorang auditor harus selalu menggunakan kecermatan profesionalnya dalam penugasan dengan mewaspadaikan kemungkinan adanya kecurangan, kesalahan yang disengaja, kesalahan/error dan kelalaian, inefisiensi, ketidakefektifan, dan konflik kepentingan serta kondisi-kondisi dan kegiatan lain dimana penyimpangan sangat mungkin terjadi agar dapat meminimalisir terjadinya salah saji material laporan keuangan yang disampaikan pihak manajemen kepada yang berkepentingan (Wiratama & Budiarta, 2015).

Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap persuasivitas bukti audit. Semakin tinggi sikap *due professional care* seorang auditor, maka semakin tinggi pula ketepatan seorang auditor dalam memberikan bukti audit yang andal.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi dan *Due Professional Care* terhadap

Persuasivitas Bukti Audit

Bukti audit merupakan informasi yang menjadi dasar untuk mendukung keputusan auditor. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang di terjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2014:3) menjelaskan auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu.

Pemberian opini akuntan harus didukung oleh kompetensi dan kecukupan bukti audit, di mana dalam mengumpulkan audit, auditor harus senantiasa menggunakan profesionalnya yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit agar di peroleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian opini akuntan. (IAI, 2011). Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai (Wiratama & Budiarta, 2015).

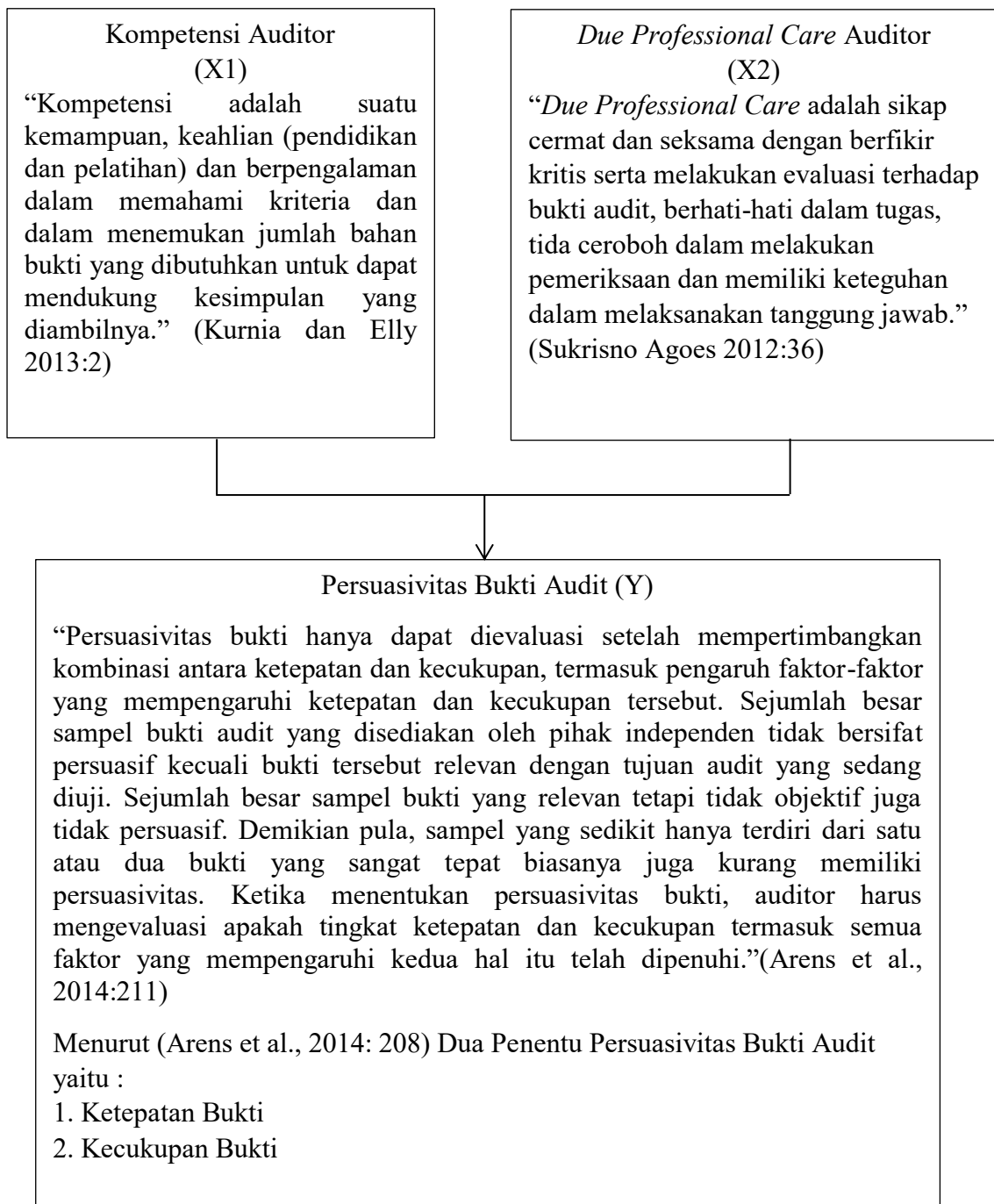
Dua faktor yang merupakan standar umum audit yaitu kompetensi dan *due professional care* ini berkaitan dengan ketepatan dan kecukupan bukti audit. Apabila auditor belum memiliki kompetensi yang cukup maka besar kemungkinan seorang auditor tidak dapat menemukan bukti audit yang tepat dan relevan. Sebaliknya, apabila auditor memiliki kompetensi yang cukup maka kemungkinan untuk mendapatkan bukti yang relevan dan tepat itu besar. Selain memiliki kompetensi, seorang auditor juga harus memiliki sikap *due professional care*. Semakin tinggi sikap *due professional care* seorang auditor, maka semakin tinggi pula ketepatan seorang auditor dalam memberikan bukti audit yang andal.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heru Prastomo pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kompetensi Auditor dan Risiko Audit terhadap Persuasivitas Bukti Audit”. diperoleh bahwa variable kompetensi auditor terbukti secara signifikan mempengaruhi variable dependen Persuasivitas Bukti Audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika rahmawita oktaviana pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh *due professional care* dan bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini audit” diperoleh hasil bahwa variable *due professional care* terbukti secara signifikan mempengaruhi variable dependen ketepatan pemberian opini audit.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka dapat digambarkan paradigm penelitian hubungan antara variable kompetensi auditor dan *due professional care* auditor terhadap persuasivita bukti audit.

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran



2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dipaparkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Jurnal	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Heru Prastomo (2019)	Pengaruh Kompetensi Auditor dan Risiko Audit Terhadap Persuasivitas Bukti Audit (Studi kasus pada kantor akuntan public Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia)	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian ini sama-sama meneliti Kompetensi Auditor dan Persuasivitas Bukti Audit</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian penulis menambahkan variable independen yaitu risiko audit</p>	Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kompetensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan kearah positif terhadap persuasivitas bukti audit. Risiko audit secara parsial berpengaruh signifikan kearah positif terhadap persuasivitas bukti . kompetensi auditor dan risiko auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persuasivitas bukti audit.
2.	Tiara Adelia (2018)	Pengaruh kompetensi dan pengalaman auditor terhadap pengumpulan	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian ini sama-sama meneliti Kompetensi</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variable kompetensi dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pengumpulan bukti

		<p>bukti audit</p> <p>(Survey pada sepuluh kantor akuntan public di kota Bandung yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia)</p>	<p>Pebedaan :</p> <p>Penelitian penulis menambahkan variable independen yaitu pengalaman auditor dan variable dependen yaitu pengumpulan bukti audit</p>	<p>audit. Secara parsial, variable kompetensi dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pengumpulan bukti audit.</p>
3	<p>Rika rahmawita oktaviana</p> <p>(2021)</p>	<p>Pengaruh <i>due professional care</i> dan bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini audit</p> <p>(Survey pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Timur)</p>	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian ini sama-sama meneliti Due Professional Care</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian penulis menambahkan variable independen yaitu bukti audit dan variable dependen yaitu ketepatan pemberian opini audit</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>due professional care</i> berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit sedangkan bukti audit berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit.</p>

Tabel 2. 2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Tahun	Kompetensi Auditor	Due Profesional Care Auditor	Risiko Audit	Pengalaman Auditor	Persuasivitas Bukti Audit
Tiara Adelia	2018	✓			✓	
Heru Prastomo	2019			✓		✓
Rika Rahmawita Oktaviana	2021		✓			
Syifa Nuraini Hapsari	2022	✓	✓			✓

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan variable kompetensi auditor, due professional care auditor dan persuasivitas bukti audit dengan penelitian Tiara Adelia (2018), Heru Prastomo (2019), dan Rika Rahmawita Oktaviana (2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian di atas tersebut dengan judul Pengaruh kompetensi dan pengalaman auditor terhadap pengumpulan bukti audit (Survey pada sepuluh kantor akuntan public di kota Bandung yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia), Pengaruh Kompetensi Auditor dan Risiko Audit Terhadap Persuasivitas Bukti Audit(Studi kasus pada kantor akuntan public Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia), Pengaruh *due professional care* dan bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini audit(Survey pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Timur).

Pernedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah variable dan tahun penelitian. Pada penelitian Tiara Adelia Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi dan pengalaman auditor, sedangkan penulis menggunakan variable independen kompetensi auditor dan *due professional care* auditor. Variable dependen pada penelitian Tiaara Adelia juga berbeda dengan penelitian penulis, pada penelitian Tiara Adelia variable dependen yaitu pengumpulan bukti audit sedangkan penulis menggunakan variable dependen persuasivitas bukti audit. Perbedaan lain terletak pada taun penelitian. Tahun penelitian Tiara Adelia yaitu taun 2018 sedangkan penelitian penulis pada tahun 2022.

Pada penelitian Heru Prastomo populasi yang digunakan yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis yaitu Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi dan risiko audit, sedangkan penulis menggunakan variable independen kompetensi auditor dan *due professional care* auditor. Variable dependen pada penelitian Heru Prastomo sama dengan penelitian penulis yaitu persuasivitas bukti audit. perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian. Heru Prastomo melakukan penelitian pada tahun 2019 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Rika Rahmawita Oktaviana variable independen yang digunakan yaitu *due professional care* dan bukti audit, sedangkan penulis menggunakan variable independen kompetensi auditor dan *due professional care*

auditor. Variable dependen yang digunakan oleh Rika Rahmawita Oktaviana yaitu ketepatan pemberian opini audit, sedangkan penulis menggunakan variable dependen persuasivitas bukti audit. populasi yang digunakan pada penelitian Rika Rahmawita Oktaviana yaitu Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Timur, sedangkan populasi yang digunakan penulis yaitu Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) definisi hipotesis sebagai berikut :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan didasarkan teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berdasarkan pembahasan diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul

penelitian : Pengaruh Kompetensi Auditor dan *Due Professional Care* Auditor Terhadap Persuasivitas Bukti Audit” yaitu :

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Persuasivitas Bukti Audit

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh *Due Professional Care* Auditor terhadap Persuasivitas Bukti Audit

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Kompetensi Auditor dan *Due Professional Care* Auditor terhadap Persuasivitas Bukti Audit